

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pintu terbuka atau disebut juga dengan *Open Door Policy* pada awalnya merupakan sebuah pernyataan prinsip yang diprakarsai oleh Amerika Serikat pada tahun 1899 dan 1900 untuk melindungi persamaan hak antar negara yang melakukan perdagangan dengan Tiongkok dan mendukung integritas teritorial dan administratif Tiongkok. Pernyataan ini diterbitkan dalam bentuk catatan edaran yang disebarakan melalui Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Hay ke Inggris, Jerman, Perancis, Italia, Jepang, dan Rusia. *Open Door Policy* akhirnya diterima dan disetujui secara hampir menyeluruh di Amerika Serikat, dan selama lebih dari 40 tahun kebijakan ini menjadi landasan kebijakan luar negeri Amerika di wilayah Asia Timur (Britannica, 2023). Nama kebijakan ini akhirnya diadaptasi ke dalam konteks migrasi dan pengungsi, kebijakan pintu terbuka atau *Open Door Policy* merupakan sebuah kebijakan politik yang memuat tentang penerimaan dan penampungan pengungsi. Adanya konflik antara pemerintah Suriah yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad dengan kelompok oposisi telah membuat adanya gelombang pengungsi yang besar. Besarnya gelombang pengungsi dari negara yang berbatasan langsung dengan Turki ini membuat Presiden Erdogan memutuskan untuk membuka perbatasan dan menerima para pengungsi dengan penerapan *Open Door Policy*.

Turki merupakan sebuah negara yang berada diantara benua Asia dan Eropa atau wilayah Eurasia. Wilayah Turki berada sepanjang Anatolia di Asia Barat Daya hingga daerah Balkan di Eropa Tenggara. Oleh karena itu, Turki juga dikenal sebagai negara transkontinental atau antar benua. Namun para ahli geografi menggolongkan Turki ke dalam benua Asia karena sebagian besar wilayah Turki berada di kawasan Asia. Secara geografis Turki berada diantara 33°-43° LU dan 25°-45° BT. Turki memiliki luas wilayah sebesar 783.562 km². Sistem dari pemerintahan Turki pada saat ini adalah Republik Parlementer, dimana Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dengan dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Republik Turki merupakan negara yang lahir setelah runtuhnya monarki Turki Utsmani pada 1923 (Dickson, 2021).

Setelah kemerdekaannya pada 29 Oktober 1923 Turki mengalami berbagai dinamika politik dan keamanan dalam negeri. Saat masih dibawah kepemimpinan Presiden pertama Mustafa Kemal Ataturk, Turki mendeklarasikan diri sebagai negara yang

menganut sekularisme, dimana agama berada di ruang khusus dengan dibawah kontrol oleh negara. Sekularisme ini semakin kuat karena konstitusi Turkiye dipegang oleh militer yang dikontrol langsung oleh Ataturk. Bahkan sepeninggalan Ataturk, militer Turkiye adalah pihak yang paling kuat untuk menjaga ideologi Kemalisme dan Sekularisme di Turkiye. Ketika pemimpin yang pro-Islam menjadi pemangku jabatan, militer Turkiye tidak segan untuk melakukan kudeta. Hal ini seperti yang terjadi kepada penggulingan Presiden Mahmut Celal Bayar (1960) dan Perdana Menteri Erbakan (1998). Kudeta lain juga terjadi pada tahun 1971 dan 1980. Stabilitas dalam negeri Turkiye pun menjadi goyah karena konflik politik ini berlangsung cukup lama (Awaliyah, 2019).

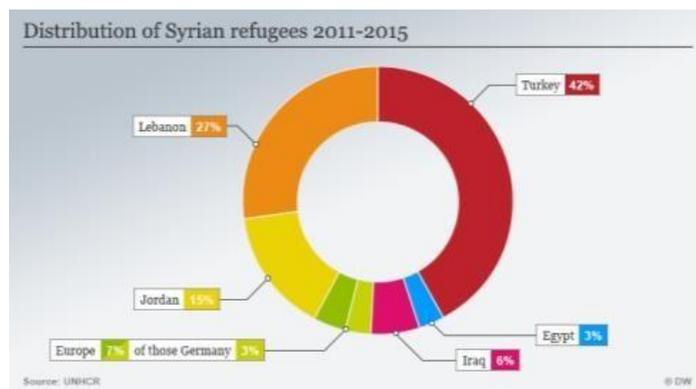
Selain tidak stabilnya penerapan demokrasi yang membuat berbagai konflik internal yang berujung pada kudeta, Turkiye juga memiliki masalah lain yang mengancam kedaulatan dan keamanan nasionalnya, yaitu adanya gerakan separatis dari etnis Kurdi yang berada di Turkiye. Etnis Kurdi yang berada di negara ini merupakan yang terbesar diantara negara-negara tetangga Turkiye lainnya, yaitu sekitar 15-20 juta jiwa tercatat pada tahun 2017 (Foundation Institut Kurde de Paris, 2017). Partai Kurdi, PKK (*Partiya Karkerên Kurdistan*) yang berbasis di Turkiye dan Suriah bagian Utara, merupakan kelompok yang berusaha untuk memperjuangkan otonomi Kurdi dengan jalur politik dan militer. PKK ini sulit diatasi karena mereka menyebar ke di beberapa negara tetangga Turkiye. Kelompok ini memulai pemberontakannya pada akhir dekade 1970-an. Separatisme Kurdi merupakan gerakan untuk memerdekakan Suku Kurdi dari negara-negara yang sudah ada dan membuat negara bernama “Kurdistan”. Gerakan ini mencakup bagian Turkiye Timur, Irak Utara, Iran Barat laut, dan sebagian kecil di Suriah dan Armenia (Jatmika, 2021).

Turkiye sudah menjadi tujuan pengungsi sejak masa kesultanan Utsmani (1299-1923). Ketika kesultanan Utsmani runtuh dan berubah menjadi negara Republik Turkiye, pemerintah Ataturk menandatangani perjanjian Lausanne. Perjanjian ini ditandatangani oleh Turkiye, Inggris, Prancis, Italia, Yugoslavia, Jepang, Yunani, Rumania, Portugal, dan Serbia pada 24 Juli 1923. Perjanjian ini berisi hal-hal yang menjadi dasar berdaulatnya negara Turkiye. Selain itu perjanjian ini juga berisi tentang kebijakan migrasi antara Turkiye, Yunani, dan Bulgaria. Kebijakan ini berupa *Population Exchange* atau pertukaran populasi. Pertukaran yang dimaksud adalah menerima dan mengirim warga minoritas Turkiye yang ada di Yunani ke Turkiye dan sebaliknya. Kebijakan pertukaran populasi adalah bentuk kebijakan yang berupaya untuk menjadikan Turkiye sebagai negara yang

memiliki identitas seragam. Kebijakan ini juga disebut sebagai awal dari adanya kebijakan penerimaan pengungsi modern (Alfan, 2018).

Fase kedua dari kebijakan penerapan pengungsi modern Turkiye terjadi pada tahun 1970 ketika Turkiye dipimpin oleh Cevdet Suvnay dimana ada kebijakan mengirim dan menerima tenaga kerja dari dan ke wilayah Eropa, utamanya ke Jerman. Kebijakan ini juga berkaitan dengan perjanjian Turkiye dengan Uni Eropa pada 1961. Pengiriman tenaga kerja ini disebabkan karena kurangnya tenaga kerja di Eropa, utamanya Jerman Barat, dan Turkiye kekurangan tenaga kerja terampil. Harapannya ketika para pekerja Turkiye yang sudah kembali dari Jerman akan mengimplementasikan pengalaman kerjanya di Turkiye dan bisa memberikan dampak positif ke ekonomi Turkiye. Perjanjian ini berakhir pada 1973 ketika adanya krisis minyak. Pada tahun setelahnya, Turkiye menjadi negara *receiving country*. Pada saat inilah kebijakan penerimaan pengungsi mulai terlihat, Turkiye kedatangan berbagai pengungsi dan imigran yang disebabkan oleh adanya revolusi Iran, perang Iran-Irak, dan invasi Uni Soviet ke Afghanistan.

Tahun 1991 adalah tahun terjadinya Perang Teluk Kedua dan perang-perang lain, seperti Iran-Irak, Irak-Kuwait, dan invasi Amerika-Irak. Adanya berbagai konflik ini menimbulkan krisis pengungsi yang menimpa etnis Kurdi. Krisis ini terjadi ketika etnis Kurdi melakukan eksodus keluar dari wilayah Irak untuk mencari suaka. Gerakan ini dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara sekitar, termasuk Turkiye. Namun Turkiye dan negara-negara sekitarnya dipaksa oleh komunitas internasional untuk menerapkan kebijakan penerimaan pengungsi. Selama kurun waktu 1988-1991, Turkiye telah menerima sekitar 700.000 hingga 800.000 pengungsi yang berasal dari etnis Kurdi di Irak dan Iran. Pada awalnya Turkiye tidak mau menerima pengungsi dan hanya membuatkan zona aman dan kamp pengungsian di luar perbatasan Turkiye, pengungsi yang terestimasi pada saat itu sekitar 460.000 pengungsi Kurdi.



Grafik 1.1 Persebaran Pengungsi Suriah di Berbagai Negara (UNHCR.com)

Bersamaan dengan adanya peristiwa Arab Spring di kawasan Timur Tengah Pada tahun 2011 terjadi perang saudara di Suriah antara oposisi dan pemerintahan Bashar al- Assad. Konflik ini membuat para warga Suriah keluar dari negaranya untuk mencari tempat untuk mengungsi. Para pengungsi ini banyak tersebar ke wilayah-wilayah sekitar termasuk ke negara Turkiye dan negara-negara di benua Eropa. Dalam merespons kasus ini Uni Eropa tidak bisa untuk membuat kebijakan pengungsi tanpa dukungan anggotanya, hal ini karena negara-negara Eropa seperti Jerman dan Inggris memperketat perbatasannya. Oleh karena itu Uni Eropa mempunyai niat bekerja sama dengan Turkiye untuk membuat *safe zone* bagi pengungsi di perbatasan Turkiye dan Suriah. Rencananya sebanyak 2 juta pengungsi akan ditampung oleh Turkiye dengan bantuan 1 miliar Euro. Namun, Turkiye terus meminta konsesi tambahan, termasuk imbalan yang lebih besar, kerja sama yang lebih luas dalam memerangi terorisme ISIS/ISIL (*Islamic State of Iraq and Syria*) dan pemberontak Kurdi, kemudahan pemberian visa bagi warga Turkiye ke Eropa, dan perundingan kembali keanggotaan Turkiye dalam Uni Eropa (Herindrasti1, 2016).

Turkiye pada awalnya menerapkan prinsip “*zero problem with neighbor*” atau tidak ada masalah dengan negara tetangga, yang berupa diplomasi pro-aktif dengan menggunakan *soft power* dan hubungan ekonomi dalam cakupan regional. Namun setelah adanya peristiwa Arab Spring, kebijakan “*zero problem with neighbor*” menghadapi sebuah tantangan yang rumit. Untuk menghadapi situasi yang baru ini, Turkiye dengan cekatan memutuskan keberpihakannya pada tuntutan global yaitu reformasi rezim Suriah. Pada tahun 2012, Menteri Luar Negeri Turkiye, Ahmet Davutoğlu menyusun ulang kebijakan luar negeri Turkiye untuk menyesuaikan dengan situasi yang ada. Dalam kebijakan luar negerinya, Turkiye ingin menunjukkan bahwa negaranya merupakan “*wise country*” atau negara bijak. Dengan konsep yang baru ini Turkiye ingin dianggap sebagai bagian sistem internasional

yang bertanggung jawab, otonom (tidak terlalu terpengaruh dengan negara lain), dan berorientasi pada manajemen krisis. Dalam manajemen krisis, terutama ketika krisis itu terjadi, penting sebagai “*wise country*” atau negara bijak berusaha untuk melakukan fungsi strategis seperti pencegahan, mediasi, resolusi konflik, atau bantuan pembangunan (Rendra, 2017).

Penerapan prinsip atau kebijakan “*wise country*” Turkiye bisa dilihat semenjak konflik Suriah meletus pada 2011, Turkiye telah berkomitmen membantu para pengungsi Suriah dengan membuka perbatasan dan mengizinkan pengungsi untuk masuk ke negaranya. Dalam rangka menanggulangi krisis pengungsi yang masuk ke perbatasan Turkiye, pemerintah Turkiye menerapkan *Open Door Policy*. Kebijakan ini berarti kebijakan pintu terbuka untuk para pengungsi, dimana para pengungsi diberikan izin dan otoritas untuk tinggal di wilayah domestik Turkiye. Turkiye berupaya untuk membuka perbatasannya bagi para pengungsi Suriah dari berbagai aspek. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan mantan Menteri Luar Negeri Turkiye, Ahmet Davutoglu, saat Ia berpidato di hadapan Dewan Keamanan PBB di New York 30 Agustus 2012 yang berbunyi “*We, in Turkey, open our doors to every Syrian who runs for safety, regardless of his or her religion, sect or ethnicity. We embrace every Syrian*” (Hidayati, 2018).

Turkiye menunjukkan perbedaan sikap dalam menangani pengungsi sejak 2011. Pada periode sebelumnya, Turkiye tidak mau mengakui pengungsi yang berasal dari Timur Tengah, kecuali yang berasal dari benua Eropa. Namun ketika *Open Door Policy* diterapkan, para pengungsi yang berasal dari Suriah diakui sepenuhnya dan diperbolehkan tinggal di Turkiye tanpa batasan waktu tertentu. Gelombang pertama dari pengungsi ini terdiri dari 252 jiwa, meliputi perempuan dan anak-anak. Pengungsi-pengungsi Suriah lebih memilih untuk mengungsi ke Turkiye karena berbagai alasan, termasuk lokasi geografis, stabilitas wilayah, bagaimana negara menerima dan memperlakukan pengungsi, serta peluang untuk melanjutkan mengungsi ke Eropa. Para pengungsi ini mendapatkan kemudahan seperti akses sewa tempat tinggal, uang makan setiap bulan, kebebasan untuk bekerja, dan penyediaan kamp-kamp pengungsian yang layak bagi para pengungsi. Penerapan *Open Door Policy* berpengaruh pada dihapuskannya istilah ‘*refugees*’ kepada para pengungsi, dan menggantinya dengan istilah ‘*guest*’. Dengan pengakuan ini, para pengungsi Suriah diperbolehkan tinggal di Turkiye tanpa adanya batasan waktu (Nielsen, 2016).

Sejak adanya konflik internal Suriah dan penerapan *Open Door Policy*, Turkiye terdampak secara langsung. Sejak 2011 Turkiye telah menerima jutaan pengungsi Suriah. Penerimaan pengungsi ini juga didasari keinginan Presiden Erdogan dan partai AKP (*Adalet ve Kalkınma Partisi*) untuk merealisasikan bergabungnya Turkiye dengan organisasi Uni Eropa yang sudah sejak lama diinginkan oleh Turkiye. Dengan masuknya Turkiye ke Uni Eropa diharapkan dapat membawa dampak positif bagi ekonomi dan keamanan Turkiye, karena sebagaimana diketahui bahwa kawasan dan militer Uni Eropa mempunyai cakupan yang luas dan besar. Salah satu dampak langsung setelah penerapan *Open Door Policy* oleh Turkiye yaitu adanya peningkatan angkatan kerja yang ada di Turkiye. Mereka tidak hanya menyediakan pekerja tambahan, namun juga keterampilan-keterampilan wirausaha para pengungsi. Pada tahun 2015 pangsa perusahaan Suriah dalam kemitraan luar negeri mencapai 26% (Esen & Binatli, 2017). Namun di sisi lain, besarnya gelombang pengungsi yang telah meningkatkan angkatan dan lapangan kerja bukanlah tanpa dampak negatif. Besarnya jumlah pengungsi di Turkiye telah membuat dampak buruk yang cukup besar bagi Turkiye itu sendiri, khususnya di bidang keamanan dan ekonomi.

Besarnya gelombang pengungsi ini memberikan dampak negatif terhadap keamanan dan ekonomi di Turki. Pembukaan perbatasan dan besarnya gelombang pengungsi membuat adanya meningkatnya angka kriminalitas dan terorisme. Para teroris memanfaatkan para pengungsi untuk penyamaran agar bisa masuk ke Turki. Ini berujung pada terjadinya berbagai serangan teroris di Turki. Serangan-serangan teroris ini sempat membuat negara Turkiye termasuk ke dalam daftar negara-negara yang berbahaya untuk dikunjungi di tahun 2016. Selain itu, besarnya gelombang pengungsi yang masuk membuat beban anggaran bagi Turkiye, karena Turkiye berusaha untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan fasilitas yang terbaik sesuai dengan standar dari PBB. Dalam upaya penanganan masalah pengungsi, Turkiye telah menghabiskan uang sekitar 30 miliar dolar Amerika Serikat, dengan 10 miliar dolar untuk biaya layanan kesehatan para pengungsi pada tahun 2018 (Canturk, 2018). jumlah ini menjadi kontribusi yang paling besar dibandingkan dengan kontribusi atau bantuan yang diberikan oleh Organisasi Internasional dan negara-negara lain. Tetapi hal ini tidaklah mudah karena tren masuknya pengungsi yang meningkat tiap tahun tidak sebanding dengan peningkatan ekonomi Turki. Hal ini berimbas pada jatuhnya Turkiye pada krisis ekonomi pada 2018 (Syukran & Ubaidullah, 2019).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dituliskan, penulis mempunyai rumusan masalah “faktor-faktor apa yang menyebabkan *Open Door Policy* memiliki dampak buruk terhadap Turkiye periode 2013-2018?”

C. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Kebijakan Publik

Konsep kebijakan publik menurut Sulaeman adalah suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu yang merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara khusus. Konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan. Kebijakan publik menempati posisi yang vital dalam penyelenggaraan negara, hal ini karena kebijakan publik merupakan instrumen yang digunakan pemerintah dalam mengatur kehidupan bernegara (Sulaeman, Affan, 1998).

Kebijakan publik juga bisa diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai orientasi pada tujuan tertentu untuk memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan ini biasanya akan tertuang dalam sebuah ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Kebijakan publik ini merupakan tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah dan berdampak besar bagi seluruh masyarakat yang berada di suatu daerah atau negara. Sebuah kebijakan bisa dilihat sebagai preferensi nilai-nilai dari elite pemerintah, walaupun tidak jarang kebijakan memang menggambarkan kebutuhan atau urgensi dari masyarakat.

Dalam model *rationalism: policy as efficient goal achievement* pembuat kebijakan harus bisa menghitung atau memperkirakan jumlah yang nantinya akan dikorbankan sebanding dengan jumlah yang akan dicapai. Selain itu pemerintah juga harus memahami nilai-nilai yang disukai masyarakat, pilihan kebijakan yang tersedia, dan konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan. Pembuat kebijakan juga harus menghitung rasio nilai yang hilang dibandingkan dengan nilai-nilai sosial yang diperoleh dari setiap alternatif kebijakan, sehingga mereka dapat memilih kebijakan yang paling efektif. Menurut model ini kebijakan pemerintah didasarkan pada pertimbangan tertentu yang mungkin tidak berkaitan dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya atau yang lain. Pemerintah mungkin mengambil suatu

kebijakan untuk mencapai sebuah tujuan umum, dan masing-masing kebijakan berfungsi sebagai komplementer antara satu dan lainnya (DR. Taufiqurokhman, 2014).

Hal ini juga yang diterapkan oleh Turkiye dalam merancang *Open Door Policy*. Sebagai negara yang berada di antara Timur Tengah dan Eropa, Turkiye menjadi negara yang strategis sekaligus rentan dari segi geopolitik, keamanan, dan sosial-budaya. Namun di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan, Turkiye ingin menjadi sebuah negara yang bijak (*wise country*) dan bisa menjadi panutan atau “*role model*” di kawasan Timur Tengah. Ini bisa dilihat dari berbagai keterlibatan Turkiye di berbagai peristiwa yang terjadi di Timur Tengah, salah satunya adalah ketika terjadinya konflik Suriah. Pada awalnya Turkiye secara diplomatis ingin membantu Suriah dengan membuka ruang komunikasi dengan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, namun ketika rezim Assad yang didukung Rusia tidak mengindahkan saran-saran dari Turkiye, akhirnya Turkiye mendukung pasukan oposisi. Eskalasi konflik Suriah yang semakin naik membuat adanya gelombang pengungsi yang besar, Turkiye yang berbatasan secara langsung dengan Suriah pun akhirnya membukakan perbatasannya agar para pengungsi Suriah bisa mendapatkan tempat yang aman. Kebijakan ini termasuk respons cepat Turkiye untuk membantu rakyat Suriah yang terdampak konflik. Pada awalnya Turkiye memprediksi bahwa eskalasi konflik tidak akan berlangsung lama, tetapi rezim Bashar al-Assad yang didukung oleh Rusia ternyata bisa bertahan sampai hari ini. Oleh karena itulah Turkiye masih menampung para pengungsi sampai saat ini.

Pembukaan perbatasan dan penampungan para pengungsi Suriah melalui *Open Door Policy* di Turkiye juga terus didorong karena adanya kerja sama Turkiye dengan Uni Eropa. Turkiye dan Uni Eropa telah bekerja sama dengan Turkiye untuk mengendalikan arus pengungsi yang akan ke benua Eropa sejak 2013. Selama adanya konflik saudara di Suriah, banyak dari warga Suriah yang berusaha mencari suaka dengan harapan kehidupan yang baru di negara-negara Eropa. Mayoritas dari mereka menyebrang ke benua Eropa melalui Turkiye dan Laut Mediterania. Adanya gelombang pengungsi ini sempat membuat Inggris dan Jerman memperketat perbatasannya. Akhirnya Uni Eropa menawarkan kerja sama dengan Turkiye untuk menampung para pengungsi Suriah. Kerja sama ini disebut dengan *UE-Turkiye joint action plan* yang disepakati 18 Maret 2016. Dengan adanya program bersama ini Uni Eropa memiliki ambisi untuk mengurangi tekanan di perbatasan Eropa dan mencegah para pengungsi masuk ke negara-negara anggota Uni Eropa baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. *UE-Turkiye joint action plan* ini menawarkan beberapa bantuan pada Turkiye, seperti bantuan keuangan untuk menangani pengungsi,

pembebasan visa Schengen kepada warga Turkiye agar bisa masuk ke wilayah Schengen, serta membuka kembali akses Turkiye agar bisa bergabung dengan Uni Eropa yang sempat mandek pada 2016. Oleh karena itu, Turkiye terus menampung para pengungsi yang berdatangan tiap tahunnya (Sholihin & Alfian, 2021).

Open Door Policy juga lahir karena Turkiye salah satu negara yang menandatangani konvensi 1951 dan protokol 1967, maka Turkiye memiliki kewajiban untuk menerima dan menampung pengungsi-pengungsi yang masuk ke wilayah teritorial negara Turkiye. Turkiye banyak menerima pengungsi dari negara-negara yang berada di sekitarnya yang sedang mengalami konflik, salah satu contohnya adalah pengungsi dari negara Suriah. *Open Door Policy* merupakan kebijakan pintu terbuka di perbatasan Turkiye bagi para imigran dan para pengungsi. Kebijakan tentang pengungsi ini tercantum pada *Law on Foreigner and International Protection* (LoFIP) (Directorate General for Migration Management (DGMM), 2013). Secara garis besar undang-undang ini adalah kode etik Turkiye untuk Orang Asing. Secara khusus, Undang-undang ini mendefinisikan aturan rezim visa negara dan prosedur penerbitan izin tinggal, alasan deportasi, dan aturan perlindungan internasional. Undang-undang tentang Orang Asing dan Perlindungan Internasional di Turkiye disetujui sebagai bagian dari implementasi program nasional untuk adaptasi legislasi Turkiye dengan legislasi Uni Eropa.

2. Konsep Keamanan Nasional

Christopher Schoemaker mengemukakan bahwa keamanan nasional dilihat utamanya melalui perlindungan dari invasi eksternal, sebuah sikap yang mendorong ke arah perang. Hasilnya adalah konsep dasar mengenai komponen kekuatan militer (Shoemaker, 1991). Keamanan nasional diartikan sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa yang bernegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi, dan militer untuk menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Keamanan nasional juga bisa diartikan sebagai kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan ekonomi, militer, politik, serta diplomasi. Pada konsep ini menekankan pada kemampuan pemerintah dalam melindungi integritas teritorial negara dari ancaman yang datang dari luar dan dari dalam negeri (Muhammad, 2016).

Keamanan nasional memiliki pengertian yang khusus dalam arti objeknya, sehingga tidak mencakup seluruh aspek keamanan tetapi difokuskan pada ancaman terhadap negara

dan tujuan vital nasional. Sistem pertahanan dan keamanan harus diarahkan untuk menjamin tegak dan menguatnya suatu bangsa dari ancaman eksternal dan ancaman internal. Sebagai negara yang berada di Timur Tengah, Turkiye sebenarnya memiliki kondisi geografis dan politik yang rawan. Hal ini diperparah dengan adanya berbagai konflik yang terjadi pada awal abad 21, seperti perang Irak-Iran, Iran-Israel, dan Arab Spring. Adanya berbagai macam konflik ini memaksa Turkiye untuk ikut terlibat. Pada 2008 Turkiye bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Iran untuk menghilangkan PKK (*Partiya Karkerên Kurdistan*) dari daratan Turkiye dan Iran. Pada tahun yang sama Turkiye juga merasa terancam oleh kemungkinan Iran mengembangkan senjata nuklir karena telah Iran menerima hak Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) untuk memiliki kemampuan nuklir damai (Altunışık, 2009).

Dengan adanya *Open Door Policy* yang diterapkan oleh Turkiye, keamanan nasional Turkiye sendiri semakin rawan. Hal ini karena pada dasarnya *Open Door Policy* berarti perbatasan Turkiye-Suriah telah sengaja dibuka dan dilonggarkan agar gelombang-gelombang pengungsi bisa masuk ke Turkiye dan segera mendapatkan bantuan kemanusiaan. Pembukaan perbatasan ini juga dilakukan Turkiye agar pasukan oposisi Suriah bisa masuk dan keluar Suriah via Turkiye. Dari segi geopolitik hal ini tentu membuat hubungan antara Turkiye dan Suriah menjadi menegang. Namun di sisi lain, pembukaan perbatasan ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, seperti penyeludup ilegal, kelompok separatis, bahkan teroris. Hal ini bisa dilihat dengan adanya kasus-kasus penyeludupan ilegal baik barang maupun manusia melalui jasa penyeludup yang menyuap para penjaga dan memanfaatkan kelonggaran perbatasan. Kelompok separatis Kurdi juga ikut menyeludupkan senjata bantuan dari negara asing yang awalnya digunakan untuk menumpas ISIS di Suriah, serta para anggotanya masuk ke Turkiye untuk memperkuat basis kelompok separatis Kurdi di Turkiye. Baik dari ISIS maupun kelompok separatis Kurdi juga menyerang Turkiye dengan serangan dan korban jiwa paling tinggi terjadi pada tahun 2016 (Dewanda, 2023).

D. Hipotesis

Dari rumusan masalah dan menggunakan teori di atas, penulis mempunyai hipotesa yaitu terdapat dua faktor yang membuat kebijakan *Open Door Policy* yang diterapkan oleh Turkiye pada periode 2013-2018 berdampak buruk terhadap Turkiye.

1. Adanya konflik Suriah dan adanya *Open Door Policy* Turkiye membuat kerentanan di perbatasan negara Turkiye dan Suriah. Masuknya para pengungsi juga dibarengi dengan masuknya para teroris ISIS dan pasukan separatis Kurdi. Hal ini membuat angka terorisme di Turkiye meningkat.
2. Adanya kebijakan *Open Door Policy* juga berdampak pada faktor ekonomi nasional dengan meningkatnya persaingan pasar kerja bagi para warga Turkiye. Hal ini juga berimbas kepada meningkatnya pengangguran. Para pengungsi Suriah telah membuat *supply shock* di sektor informal dan *demand shock* di sektor formal.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang menjadi dampak buruk lonjakan pengungsi Suriah akibat *Open Door Policy* yang terjadi pada 2013, yang juga merupakan salah satu faktor adanya krisis ekonomi Turkiye pada 2018.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan penelitian pada data yang telah didapatkan (Hidayat, 2017). Dalam menganalisis dampak buruk *Open Door Policy* Turkiye periode 2013-2018 penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara deskriptif pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam mengolah data, penulis menggunakan metode studi pustaka. Menurut Sarwono, studi pustaka merupakan kegiatan untuk mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian yang sejenis untuk mendapatkan pembahasan yang lebih dalam mengenai sebuah pokok penelitian. Penggunaan studi pustaka ini ditujukan agar mendapatkan informasi-informasi yang relevan dan memperdalam topik penelitian (Sarwono, 2006). Jenis data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, berita, dan penelitian terdahulu.

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada pembahasan dampak buruk adanya lonjakan pengungsi Suriah dari penerapan *Open Door Policy* Turkiye pada periode 2013, yang menjadi salah satu faktor adanya krisis ekonomi Turkiye pada 2018.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dengan empat bab dan pembahasan pada setiap bab akan dijelaskan secara spesifik pada tiap sub-sub bab.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan delapan sub bagian, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penelitian. Pada bagian ini dijelaskan terkait dinamika Turkiye yang sebelum adanya *Open Door Policy*, seperti adanya konflik internal antara pendukung Sekularisme yang ditinggalkan oleh Atatürk dan masalah etnis Kurdi yang sudah ada sejak pertama kali Turkiye berdiri. Selain itu dijelaskan terkait sejarah masuknya pengungsi yang masuk ke negara Turkiye, baik sejak dinasti Utsmani sampai menjadi Republik Turkiye yang akhirnya tercipta *Open Door Policy* pada era Presiden Erdogan. Dari tema pembahasan di atas penulis menemukan sebuah rumusan masalah berupa “bagaimana dampak buruk *Open Door Policy* Turkiye periode 2013- 2018?”. Untuk menjawab tentang dampak buruk dari penerapan *Open Door Policy* Turkiye, penulis menggunakan konsep kebijakan publik untuk menjelaskan mengapa Turkiye menerapkan *Open Door Policy* dan konsep keamanan nasional, serta konsep *human security* untuk menjelaskan dampak buruk dari penerapan *Open Door Policy*.

Bab II merupakan pembahasan tentang dampak negatif dari penerapan *Open Door Policy* oleh Turkiye yaitu adanya ancaman keamanan dalam negeri Turkiye dari pelanggaran perbatasan yang awalnya “disengaja” agar para pengungsi Suriah bisa masuk Turkiye dengan mudah, serta pasukan oposisi Suriah bisa keluar-masuk via Turkiye karena Turkiye yang mendukung reformasi Suriah. Namun di sisi lain juga dimanfaatkan para teroris ISIS dan kelompok separatis Kurdi yang diperkuat bantuan dari negara-negara asing untuk dengan mudah melakukan infiltrasi ke Turkiye. Masuknya para teroris ini memberi dampak yang cukup serius bagi Turkiye.

Bab III merupakan pembahasan tentang dampak di bidang ekonomi pasca penerapan *Open Door Policy*. Dengan adanya *Open Door Policy* Turkiye memiliki kewajiban untuk menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung dan menjamin hidup para pengungsi

Suriyah yang masuk ke negaranya. Hal ini tentunya menyebabkan adanya alokasi dana yang besar untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi. Meskipun ada bantuan dari organisasi internasional, namun Turkiye masih menjadi pemodal utama untuk menangani para pengungsi Suriyah. Masuknya pengungsi juga menyebabkan adanya *supply shock* di sektor informal dan *demand shock* di sektor formal. Ini diperparah adanya penurunan wisatawan asing di Turkiye akibat serangan-serangan teroris. Berbagai kebijakan untuk mendukung penampungan para pengungsi juga menjadi salah satu faktor adanya krisis ekonomi yang dirasakan oleh Turkiye pada tahun 2018.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari dampak buruk penerapan *Open Door Policy* Turkiye pada tahun 2013-2018. Selain itu terdapat juga kontribusi penelitian ini terhadap hubungan internasional. Keterbatasan dan rekomendasi penelitian juga tertuang pada bab ini.